

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEMUAN
HUKUM BARU (*RECHTVINDING*) TENTANG STATUS ANAK LUAR
KAWIN**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)

ABSTRAK

Henlie Fernandes*

Ayu Trisna Dewi, S.H., M.Kn.**

Azmiati Zuliah, S.H., M.H.***

Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga tinggi negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya tersebut, dalam putusannya sering menimbulkan pro dan kontra.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam penemuan hukum baru (*rechtvinding*), batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penemuan hukum baru (*rechtvinding*) dan implementasi hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memuat norma hukum baru. Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi, dimana kekuasaan kehakiman terbagi 2 (dua) cabang, yaitu cabang peradilan biasa yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam menemukan hukum baru selayaknya dibatasi dengan ketentuan hukum maupun norma-norma. Ketidakjelasan batasan tersebut dapat menyebabkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *judicial* dipandang layaknya lembaga *politic legislator*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin menimbulkan persoalan di masyarakat terutama terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melahirkan norma baru serta implementasinya yang sulit diterapkan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Penemuan Hukum Baru, Status Anak Luar Kawin

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

** Dosen Pembimbing I, Dekan dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

*** Dosen Pembimbing II, Kaprodi dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENEMUAN HUKUM BARU (*RECHTVINDING*)
TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Henlie Fernandes

NPM : 15110091

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ayu Trisna Dwi S.H., M.Kn.

Azmiati Zuliah, S.H., M.H.

Dekan,

Ketua Program Studi,

Ayu Trisna Dewi, S.H, M.Kn.

Azmiati Zuliah, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
MEDAN
2019**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa
Medan-Sumatera Utara, Strata I bagi:

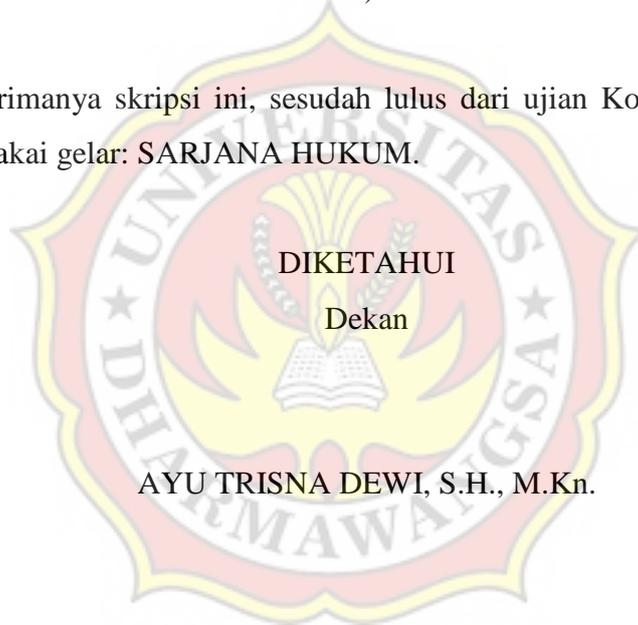
NAMA : Henlie Fernandes

NPM : 15110091

JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penemuan
Hukum Baru (*Rechtvinding*) Tentang Status Anak Luar
Kawin. (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar: SARJANA HUKUM.



DIKETAHUI

Dekan

AYU TRISNA DEWI, S.H., M.Kn.

Pembimbing I

Pembimbing II

Ayu Trisna Dewi, S.H., M.Kn.

Azmiati Zuliah, S.H.,

M.H.

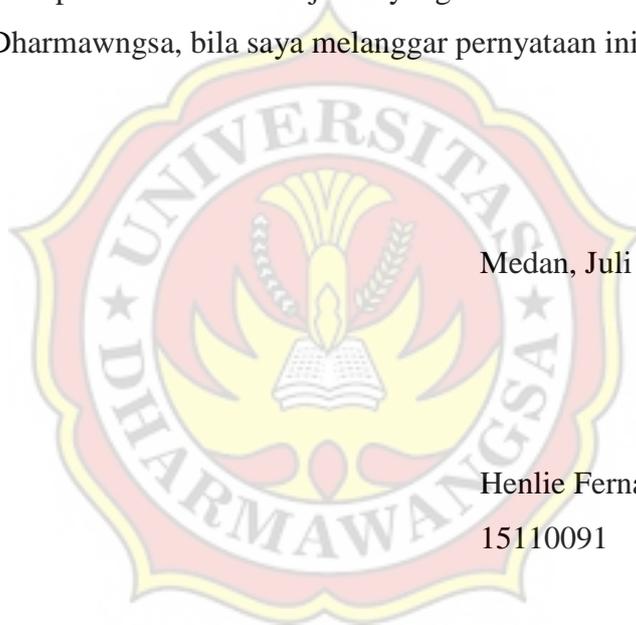
NIDN: 0126038101

NIDN: 0109027604

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini.



Medan, Juli 2019

Henlie Fernandes

15110091